

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*.” Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis. Dengan demikian maka tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga Negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia (Winataputra dan Budimansyah, 2007: i). Untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan tanggung jawab dalam urusan-urusan publik diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan berperan serta. Keterampilan ini pada gilirannya ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan watak yang dapat meningkatkan kemampuan individu warga Negara berperan serta dalam proses politik, yang selanjutnya dapat mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan berfokus kepada tiga komponen dasar pengembangan, yaitu (1) pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) watak atau karakter kewarganegaraan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh “*Civic Education Policy Study (CEPS)*” dengan menggunakan metode “*Ethnographic Delphi Future Research*

(EDFR)” sebuah jaringan penelitian internasional yang dirancang untuk mengkaji “...the changing character of citizenship over the next twenty-five years and the implications of these changes for educational policy for nine participating nations and beyond”, yakni perubahan karakter kewarganegaraan untuk lebih dari 25 tahun mendatang beserta implikasinya terhadap perubahan kebijakan pendidikan perlu diperhatikannya pendidikan kewarganegaraan (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 2). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan sebuah model “citizenship education” yang mampu mengembangkan warganegara multidimensi (*multidimensional citizenship*). Warganegara Multidimensional itu memiliki lima atribut pokok, yakni:.....”...a sense of identity; the enjoyment of certains rights; the fulfilment of corresponding obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of basic societal values” (Cogan,1998:2-3). Dengan kata lain secara konseptual seorang warganegara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu: jati diri; kebebasan untuk menikmati hak tertentu; pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait; tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 1-2).

Berdasarkan perkembangan mutakhir, tujuan PKn (*civic education*) adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warganegara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik dalam tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 187-188). Sebagaimana Branson, (1998: 8-25) dalam Komalasari (2008: 2) mengatakan Pendidikan

Kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan *civic competence* (kompetensi kewarganegaraan). Aspek-aspek *civic competence* tersebut meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Selanjutnya Budimansyah dan Suryadi, (2008: 59) mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif dan ilmiah dalam proses politik dan dalam *civil society*.

Sebagaimana hal di atas, partisipasi yang bertanggung jawab dalam proses politik Branson (1998: 9) mengkategorikan sebagai *interacting*, *monitoring*, and *influencing*. Interaksi (*Interacting*) berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warganegara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab dan berunding dengan santun, Memonitor (*monitoring*) sistem politik dan pemerintahan, mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga Negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berarti fungsi pengawasan atau *watchdog* warga negara. Akhirnya kecakapan partisipatoris dalam hal mempengaruhi, mengisyaratkan pada kemampuan proses-proses politik dan pemerintahan baik proses-proses formal maupun informal dalam masyarakat adalah sangat penting untuk membangun kecakapan partisipatoris sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah (Budimansyah dan Suryadi, 2008: 59-60).

Sementara itu Lee, (1999: 5) dalam Komalasari (2008: 2) dari visi para “*Asian Education Leaders*” mengatakan: “dalam era globalisasi Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan pada pengembangan kualitas warganegara yang mencakup “*spiritual development, sense of individual responsibility, and reflective and autonomous personality*”. Oleh karena itu kurikulum dan pembelajaran seyogyanya mengembangkan visi “*globalization, localization, and individualization for multiple intelligence*” (Cheng: 1996: 6). Visi tersebut pada dasarnya terpusat pada pengembangan “*Learning intelligence*” dalam dimensi-dimensi “*social, cultural, political, economic, and technological intelligences*”, sebagaimana dikenal secara utuh dalam “*Pentagon Theory of Contextualized Multiple Intelligence*” (Cheng, 1999: 7).

Dengan hal di atas maka Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia apalagi dalam menghadapi kecenderungan global, harus ditempatkan sebagai salah satu bagian kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*” (Komalasari, 2008: 3). Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut (Budimansyah, 2008: 180): *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila,

kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content-embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Hal di atas mensyaratkan Pendidikan Kewarganegaraan baik secara kurikuler, teoretik dan programatik perlu di rancang di dalam proses pembelajaran sehingga lahir warganegara yang baik dan cerdas (*good and smart citizenship*). Dalam proses pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*powerfull learning area*) (Budimansyah, 2008: 182). Di lain pihak sebagian besar pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih menampakkan ciri-ciri sistem belajar konvensional, setiap aspek dari proses pembelajaran itu dinilai mengandung banyak kelemahan bahkan secara agregat menjadi kontraproduktif terhadap pengembangan diri dan kemampuan intelektual siswa (Komalasari, 2008: 9). Hal ini berkesan ciri-ciri sistem belajar konvensional yang ditandai dengan adanya kelas yang tertutup dalam sekolah yang juga tertutup dari lingkungannya, seting ruangan yang statis dan penuh formalitas, guru menjadi satu-satunya sumber ilmu dan hanya papantulis sebagai sarana utama dalam proses *transfer of knowledge*, situasi dan suasana belajar yang hening untuk mendapatkan konsentrasi belajar maksimal, menggunakan buku

wajib yang cenderung menjadi satu-satunya yang sah sebagai referensi di kelas dan adanya model ujian dengan soal-soal pilihan ganda yang hasilnya menjadi ukuran kemampuan siswa (Suryadi, 2006: 27).

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMK Wirakarya Ciparay Kabupaten Bandung, dapat dinyatakan bahwa kondisi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan saat ini adalah sebagai berikut (1) Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah yang berkesan bersifat pembelajaran hanya berlangsung satu arah (2) Keterampilan guru dalam mengelola kelas masih bersifat kaku terlihat hanya berada di depan dekat papan tulis saja (3) pembelajaran berpusat pada penguasaan konsep dan kurang merangsang atau mengembangkan keterampilan sikap kebersamaan/gotong royong, berfikir secara kritis, (4) pembelajaran yang berlangsung cenderung tidak melibatkan pembangunan pengetahuan siswa, karena guru selalu mendominasi pembelajaran, akibatnya proses pengembangan belajar Pendidikan Kewarganegaraan terkesan terbatas. Kegiatan pembelajaran hanya di arahkan pada *learning to know*, kearah pengembangan aspek kognitif dan mengabaikan pengembangan pada *learning to do and learning lifetogether* aspek afektif serta psikomotor.

Beranjak dari permasalahan di atas, sesuai dengan yang dikatakan Somantri (2001: 245) bahwa kurang bermaknanya Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa dikarenakan masih dominannya penerapan metode pembelajaran konvensional seperti *ground covering technique*, *indoktrinasi*, dan *narrative technique* dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sehari-hari. Hal itu

dapat mengakibatkan guru tidak dapat berimprovisasi secara kreatif untuk aktifitas lainnya selain dari pembelajaran rutin tatap muka yang terjadwal dengan ketat sehingga pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman kepada siswa melalui pelibatangannya secara proaktif dan interaktif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk memecahkan berbagai kekurangan bermaknaan masalah tersebut, pendidikan kewarganegaraan hendaknya tidak hanya berisi hapalan belaka akan tetapi dipadukan dengan kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat dan proses pembelajaran hendaknya mendukung pengembangan partisipasi siswa, kebersamaan (gotong royong), kerja sama dengan didasarkan kepada dialog kreatif yang komunikatif. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (*Cooperative Learning*)/ (belajar bersama/ gotong royong)/ kelompok belajar kooperatif sebagai salah satu alternatif.

Pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (*Cooperative learning*) sebagai suatu metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta pendekatan ini memandang bahwa proses belajar benar-benar berlangsung dengan kolaboratif. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu pendekatan yang mencakup kelompok kecil dari siswa yang bekerja sama sebagai suatu tim untuk memecahkan masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau menyelesaikan suatu tujuan bersama. Kerjasama dalam pembelajaran itu merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup baik masa sekolah maupun setelah hidup di tengah-tengah masyarakat, karena dengan kerjasama akan menumbuhkan suasana membangun, saling menghargai, saling mengerti dan

saling membantu satu sama lainnya sebagaimana Anita Lie (2003: 27) menyatakan: tanpa kerjasama, tidak akan ada individu, keluarga, organisasi atau sekolah tanpa kerjasama kehidupan ini sudah punah.

Dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw akan memunculkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagaimana Nasution (1989: 152) menyatakan bahwa, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (*cooperative learning*) itu efektif bila setiap individu merasa tanggung jawab terhadap kelompok, anak turut berpartisipasi dan bekerja sama dengan individu lain secara efektif, menimbulkan perubahan yang konstruktif pada kelakuan seseorang dan setiap anggota aman dan puas dalam kelas. Sejalan dengan pendapat Nasution Kauchak dan Eggen dalam Azizah (1998: 17), mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja sama secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. Begitu pula menurut Slavin (1995: 17), mengatakan bahwa metode pembelajaran dengan *cooperative learning* memberikan keuntungan sebagai berikut:

- a. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma kelompok;
- b. Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama berhasil;
- c. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok;
- d. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam mengemukakan pendapat.

Menurut Arends (1997: 118) bahwa: “Tidak satu pun studi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memberikan pengaruh negatif. Nur Asma (2006: 26) menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (*Cooperative learning*) dapat membantu siswa mengaktifkan pengetahuan latar mereka dan belajar dari latar teman sekelas mereka. Sedangkan Davidson dalam Nur Asma (2006: 26) menyatakan bahwa: “Keuntungan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan kecakapan individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah, meningkatkan komitmen, dapat menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebayanya dan siswa yang berprestasi belajar orang lain, tidak bersifat kompetitif dan tidak memiliki rasa dendam. Slavin, (1995) dalam Nur Asma, (2006: 26), menyatakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat menimbulkan motivasi sosial siswa karena adanya tuntutan untuk menyelesaikan tugas.

Berdasarkan pada beberapa pernyataan di atas, maka keuntungan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (*Cooperative Learning*) adalah:

- a. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (*cooperative learning*) lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibanding dengan model pembelajaran individual;
- b. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menyebabkan aspek psikologis siswa menjadi terangsang dan lebih aktif yang disebabkan oleh adanya kebersamaan dalam kelompok, sehingga siswa lebih mudah berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana;

- c. Pada saat berdiskusi fungsi ingatan siswa menjadi lebih aktif, bersemangat dan berani mengemukakan pendapat
- d. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (*Cooperative Learning*) dapat meningkatkan kerja keras siswa lebih giat dan lebih termotivasi;
- e. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tampak dikala siswa menerapkannya dalam menyelesaikan tugas yang kompleks;
- f. Mempunyai motivasi mengaktualisasikan dirinya untuk diterima dalam suatu kelompok;
- g. Melakukan kerja keras yang hasilnya dapat memberikan sumbangan bagi kelompoknya.

Selain hal di atas, beberapa hasil penelitian sebagaimana diungkapkan Solihatun dan Raharjo (2008: 13) bahwa, Stahl (1992) dalam penelitiannya di beberapa sekolah dasar di Amerika menemukan penggunaan model *cooperative learning* mendorong tumbuhnya sikap kesetiakawanan dan keterbukaan di antara siswa. Penelitian ini juga menemukan bahwa model tersebut mendorong ketercapaian tujuan dan nilai-nilai sosial dalam pendidikan *social studies*. Kemudian Webb (1985), menemukan bahwa dalam pembelajaran dengan menggunakan model *cooperative learning*, sikap dan perilaku siswa berkembang ke arah suasana demokratisasi dalam kelas. Di samping itu, penggunaan kelompok kecil siswa mendorong siswa lebih bergairah dan termotivasi dalam mempelajari IPS.

Dari kedua hasil temuan di atas terlihat bahwa pembelajaran dengan *cooperative learning* dapat menumbuhkan sikap kesetiakawanan, keterbukaan

diantara siswa secara demokratis, tetapi mengapa Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih belum dapat menampilkan tingkat kompetensi siswa yang tinggi setelah berubahnya pembelajaran dari bersifat indoktrinatif kepada partisipatif, padahal berbagai model dan metode telah berusaha diimplementasikan oleh guru.

B. Fokus Masalah Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa?”

Berdasarkan fokus masalah penelitian di atas, lebih lanjut dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMK?
2. Bagaimana Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMK?
3. Kendala-kendala apa yang ditemukan pada proses pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMK?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala-kendala proses pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMK?

C. Hipotesis Tindakan

Hipotesis dalam penelitian ini berupa hipotesis tindakan, yaitu :
“Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan pengetahuan Kewarganegaraan siswa.”

D. Definisi Konsep

Berpijak pada permasalahan (pertanyaan) penelitian di atas, perlu dijelaskan dan ditegaskan beberapa konsep yang digunakan di dalam penelitian ini, hal ini dimaksud guna menghindari timbulnya ‘salah konsep’ dan ‘salah pengertian’ dalam menginterpretasi. Adapun penjelasan konsep-konsep sebagaimana berikut:

1. Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya (Arends, 1997). Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model

pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 – 6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain (Arends, 1997).

Kooperatif jigsaw dalam pendidikan kewarganegaraan didesain untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan dan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian, “siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan” (Lie, A., 1994).

2. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*” (Cogan, 1999: 4). Maksudnya adalah bahwa “*civic education*” merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa.

Dalam kurikulum 2006, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, social cultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

3. Pengetahuan Kewarganegaraan

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), yaitu pemahaman mendasar yang dimiliki oleh siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang meliputi demokrasi dan struktur pemerintahan, kewarganegaraan, dan *civil society*.

Berdasarkan *National Standards and Civic Framework for the 1988 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* (Branson, 1999: 9), komponen pengetahuan kewarganegaraan ini diwujudkan dalam lima pertanyaan penting yaitu: 1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan; 2) Apa fondasi-fondasi sistem politik; 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi menegakan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi; 4) hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional; 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum Penelitian ini bertujuan, *pertama*, mengkaji, dan menganalisis secara reflektif, partisipatif dan kolaboratif terhadap realitas, kendala, problematika aktual, dan implikasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan berdasarkan penggunaan *cooperative learning*. Baik terhadap peningkatan kinerja guru dan siswa serta iklim situasi sosial kelas selama pelaksanaan tindakan melalui pemaknaan terhadapnya. *Kedua* menemukan bahan informasi dan rujukan konseptual dalam mengadakan perubahan, perbaikan dan peningkatan iklim pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMK yang lebih ‘membumi’ (*grounded*) terhadap realitas pembelajaran di kelas.

Sedangkan secara khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang perencanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMK.
2. Memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMK.
3. Mengidentifikasi Kendala dan persoalan yang ditemukan pada proses pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMK.
4. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala dan persoalan yang ditemukan pada proses pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMK.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis studi ini diharapkan dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang kolaboratif, efektif, mengenai perencanaan, pengorganisasian dan penyajian materi, metode serta evaluasinya secara utuh khususnya dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, agar tujuan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan dapat dicapai dengan hasil maksimal.

2. Secara Praktis

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut:

1. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi ke arah pengembangan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan pengetahuan kewarganegaraan siswa.
2. Bagi institusi SMK/SMA/Sederajat, penelitian ini berguna sebagai *feedback* sekaligus sebagai parameter untuk mengetahui seberapa jauh pembaharuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lapangan telah bergulir dan membawa hasil yang diharapkan.

3. Para guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengukur seberapa jauh kesiapan guru-guru untuk memulai dan meningkatkan pembaharuannya baik yang menyangkut pemahaman strategi pembelajaran maupun substansi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
4. Bagi siswa, diharapkan memperoleh pengalaman baru dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan dalam upaya peningkatan prestasi belajar.
5. Bagi Para Pengambil Kebijakan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, temuan ini juga bermanfaat sebagai pijakan konseptual dalam mengambil dan merumuskan kebijakan kependidikan, khususnya dalam melakukan inovasi kependidikan yang lebih kontekstual bagi iklim SMK juga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan khasanah konsep-teoretik dan pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan (SMA) serta bagi pengembangan perspektif kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih fungsional dan bermakna bagi siswa dengan memposisikan siswa sebagai sentralitas program Pendidikan Kewarganegaraan.

G. Paradigma Pemikiran

